

Berbagai makna inovasi kemanusiaan

Buah pikiran dari Community-Led
Innovation Partnership (CLIP) dengan
menggunakan lensa pasca-kolonial

Community-Led Innovation Partnership

Makalah diskusi

September 2022

Funded by



elrha



START
NETWORK



CDP



Ucapan Terima Kasih

Makalah ini dibuat atas nama Community-Led Innovation Partnership (Kemitraan Inovasi yang Dipimpin Komunitas – CLIP), sebuah kemitraan antara Elrha, Start Network, Asia Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) (Innovation Hub, diselenggarakan oleh Church World Service (CWS) Jepang), Center for Disaster Preparedness (CPD, Filipina), Start Network Hub di Guatemala (diselenggarakan oleh la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA), Start Network Hub di Republik Demokrasi Kongo (bergabung pada tahun 2023) dan Yakkum Emergency Unit (Indonesia). CLIP didanai oleh departemen Foreign, Commonwealth & Development Office Britania Raya.

Makalah ini ditulis oleh Isabel Medem dan Ian McClelland di Elrha. Ucapan terima kasih kami untuk Athena Madan, Olaolu Adeleye, Ash Prasad, Kenny Panza, Walter Alvarez-Bardales, Aanu Ighagbon, dan Chafika Eddine di Royal Roads University untuk penelitian awal mereka yang menjadi dasar laporan ini. Ucapan terima kasih kami juga kepada Geanette "Chie" Galvez di Centre for Disaster Preparedness, Jessica Novia di Yakkum Emergency Unit dan Jessica Novia di Asociación de Servicios Comunitarios de Salud atas komentar bijaksana, buah pikiran, dan kontribusi langsung mereka untuk bab 3, serta Takeshi Komino di Asia Disaster Reduction and Response Network, Alessandra Podesta di Start Network, dan Kristin Bergtora Sandvik di Peace Research Institute Oslo atas ulasan dan umpan balik mereka. Ucapan terima kasih yang khusus kepada Émilie S. Koum Besson atas keterlibatannya yang mendalam dalam meninjau makalah ini dan saran-saran bijaksana yang begitu banyak darinya.

Referensi

Medem, I., McClelland, I. (2022). Berbagai Makna Inovasi Kemanusiaan: Buah pikiran dari Community-Led Innovation Partnership dengan menggunakan lensa pascakolonial. Makalah Diskusi CLIP. Community-Led Innovation Partnership.

Tentang para mitra

Elrha adalah badan amal global yang mencari solusi untuk masalah kemanusiaan yang kompleks. Visinya adalah dunia yang memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak krisis kemanusiaan. Badan ini adalah aktor mapan dalam komunitas kemanusiaan yang bekerja dalam kemitraan bersama organisasi kemanusiaan, peneliti, inovator, dan sektor swasta untuk mengatasi sejumlah tantangan tersulit yang dihadapi orang di seluruh dunia.

Start Network adalah jaringan global lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang terdiri dari lebih dari 50 lembaga bantuan nasional dan internasional dari lima benua. Misionya adalah menciptakan era baru aksi kemanusiaan yang akan menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui inovasi, pendanaan cepat, aksi dini, dan lokalisasi.

Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil nasional di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Sejak tahun 2002, ADRRN telah berkembang pesat dari jaringan yang berfokus pada kesadaran menjadi suara regional dalam isu-isu advokasi dan pengembangan kapasitas juga. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan koordinasi, berbagi informasi dan kolaborasi di antara organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pengurangan dan respons krisis yang efektif dan efisien di kawasan Asia-Pasifik.

ASECSA (la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, Guatemala), mewakili Start Network Guatemala Hub, adalah asosiasi lebih dari 48 organisasi berbasis masyarakat di Guatemala yang memperjuangkan akses kesehatan masyarakat Pribumi perdesaan. Sejak didirikan pada tahun 1978, ASECSA telah mengembangkan pengalaman dalam respons kemanusiaan. Selama 15 tahun, asosiasi ini telah menerapkan strategi manajemen pengurangan risiko bencana (PRB) di masyarakat perdesaan yang paling berisiko.

Center for Disaster Preparedness (CDP), Filipina, bekerja dengan LSM, organisasi masyarakat, masyarakat dan lembaga pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan pencegahan dan mitigasi krisis, kesiapan, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta pemulihan di seluruh kepulauan ini. Inovasi adalah elemen strategis dari pekerjaan inti CDP, yang mencakup PRB, respons, dan pemulihan.

Yakkum Emergency Unit (YEU), Indonesia, memiliki mandat untuk memberikan tanggap darurat yang inklusif – mendorong partisipasi masyarakat dalam penilaian kebutuhan dan distribusi bantuan. YEU bekerja untuk membangun ketahanan masyarakat melalui adaptasi perubahan iklim dan PRB yang dipimpin masyarakat. YEU adalah organisasi koordinator nasional untuk Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction, anggota penting platform PRB

nasional, platform PRB provinsi di Yogyakarta dan Sigi, serta kluster nasional Forum Kemanusiaan Indonesia, termasuk kluster kesehatan. YEU juga merupakan anggota Core Humanitarian Standard Alliance, dan bekerja erat dengan organisasi lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	5
Pendekatan, metodologi, dan posisionalitas	7
1. Developmentalisme dan berbagai teori pascakolonial.....	9
2. Wacana dominan dan cara kerja inovasi kemanusiaan	14
3. Menyegarkan konsep inovasi kemanusiaan	17
4. Jalan ke depan.....	21
Kesimpulan	27
Bibliografi	29

Pengantar

Pada tahun 2020, Community-Led Innovation Partnership (CLIP) dibentuk oleh Elrha (Britania Raya), Start Network (Britania Raya) dan Tokyo Innovation Hub (Jepang) Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) untuk mendukung program operasional dalam inovasi kemanusiaan oleh Center for Disaster Preparedness (CDP, Filipina), Yakkum Emergency Unit (YEU, Indonesia) dan Start Network Hub di Guatemala yang diselenggarakan oleh la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA). Kemitraan ini didanai oleh departemen Foreign, Commonwealth & Development Office Britania Raya (UK).

Sejak kemitraan ini terjalin, muncul kembali minat dan perdebatan tentang peran rasisme struktural di dalam masyarakat, secara umum, serta di sektor pembangunan dan kemanusiaan, yang sekali lagi menghadapi perhitungan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya (Ali & Murphy, 2020). Organisasi-organisasi ditantang untuk merenungkan peran yang mereka mainkan dalam sistem yang ditandai dengan kekuasaan yang tidak seimbang, ketidakadilan, dan rasisme struktural, serta bagaimana mereka dapat mengubahnya melalui pendidikan, kebijakan, dan praktik.

CLIP sendiri berada di persimpangan komitmen Grand Bargain¹ untuk mendukung respons kemanusiaan lokal dan "perubahan inovasi" dekade terakhir, yang inovasi ini telah dimantapkan dalam inti pembuatan kebijakan kemanusiaan (Scott-Smith, 2016). Berbagai ide yang mendukung inovasi kemanusiaan memiliki pengaruh kebijakan global langsung maupun tidak langsung. Seperti tulisan Kristin Sandvik, "Agenda inovasi kemanusiaan, proyeknya, pemangku kepentingan, dan visi peningkatan... *punya pengaruh*. Bagaimana perubahan buah pikiran wacana inovasi kemanusiaan menyatakan banyak hal tentang kekuasaan, distribusi sumber daya, dan tata kelola kemanusiaan," (Sandvik, 2017).

Sebagai pengakuan atas kekuatan wacana inilah kami berusaha untuk menginterogasinya. Sebagai kemitraan yang beroperasi lintas batas dan budaya, kami ingin melangkah mundur, merenungkan, dan memeriksa pengetahuan serta keyakinan yang menjadi dasar kemitraan kami. Ini berarti memeriksa berbagai perspektif kami tentang sektor kemanusiaan, dan mempertanyakan bagaimana agenda inovasi kemanusiaan dikonsepsikan, diterapkan, dan dievaluasi. Kami ingin memahami bagaimana kemitraan kami memperkuat sistem

¹ Grand Bargain adalah kesepakatan antara beberapa organisasi kemanusiaan dan donor terbesar yang telah berkomitmen untuk memberikan lebih banyak sumber daya ke tangan orang yang membutuhkan, dan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi aksi kemanusiaan. Baca: <https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain>.

kekuasaan dan pengetahuan yang bermasalah, dan bagaimana kami dapat berhasil melakukan berbagai hal secara berbeda.

Walaupun didasarkan pada diskusi yang substansial, sebuah tinjauan pustaka menyeluruh dan penelitian awal yang dilakukan oleh Royal Roads University, makalah ini memiliki tujuan utama untuk merekam percakapan dan buah pikiran kami, dan untuk membahas peran inisiatif inovasi yang dipimpin masyarakat dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuatan di sektor kemanusiaan. Kami berharap ini akan menarik dan berharga bagi orang lain, khususnya di bidang kebijakan dan pendanaan inovasi dan bantuan kemanusiaan.

Pendekatan, metodologi, dan posisionalitas

Makalah ini merupakan puncak dari sebuah perjalanan pembelajaran dalam Community-Led Innovation Partnership. Pada tahun 2021, ketika kemitraan ini terbentuk, kami menugaskan Royal Roads University untuk mengerjakan proyek penelitian yang memeriksa bagaimana kolonialisme memanifestasikan diri dalam model inovasi kemanusiaan dan pendekatan dukungan inovasi serta untuk mengusulkan cara ke depan untuk membangun praktik yang lebih setara dan inklusif. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang, pada gilirannya, memicu percakapan lebih lanjut di seluruh kemitraan.² Karena ASECSA, CDP, dan YEU masing-masing membuat program mereka di Guatemala, Filipina dan Indonesia, makalah ini mengambil arah baru karena kami ingin menggabungkan buah pikiran mereka tentang kemitraan dan menggunakan kesempatan ini untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan perspektif kami yang terus berkembang. Makalah yang dihasilkan adalah catatan dari diskusi yang sedang berlangsung ini.

Dalam tulisan ini, kami menjadikan pemikiran kami berakar dalam sejarah keterlibatan akademis dengan kolonialisme, yang panjang, kompleks, multibahasa dan beragam secara geografis. Sebagian besar aktivisme yang telah menghasilkan fase renungan diri baru-baru ini di sektor pembangunan internasional mengacu erat ke berbagai konsep dan kerangka kerja ini, yang kami yakini penting untuk diakui. Bab 1 menguraikan berbagai teori pascakolonial dan pertanyaan tentang kekuasaan, suara dan representasi, berdasarkan tinjauan pustaka singkat tentang teori pascakolonial, yang terutama diilhami oleh *Postcolonialism, Decoloniality and Development* (McEwan, 2019) dan direktori daring globalsocialtheory.org. Bab 2 menyajikan dan membahas tinjauan pustaka tentang inovasi kemanusiaan dan berbagai istilah penting yang terkait untuk memberikan garis besar dari kumpulan pengetahuan yang sebagian besar telah membentuk agenda inovasi kemanusiaan.

Memiliki pemahaman tentang pertanyaan-pertanyaan teori pascakolonial ini mengharuskan kita untuk bertanya dan mempertimbangkan akar dari inovasi kemanusiaan yang mendukung berbagai perspektif dalam Global North,² kita melihat ke CLIP itu sendiri. Proses ini termasuk berbagi ringkasan Bab 1 dan 2 dengan ASECSA, CDP dan YEU, dan membahas isinya dalam komunikasi panggilan "pertukaran pembelajaran" selama dua jam. Kemudian, kami meminta setiap mitra untuk menyampaikan pemikiran dan perspektif mereka tentang bagaimana kolonialitas memanifestasikan diri di CLIP. Bab 3 membahas berbagai wawasan dari latihan ini.

² Walaupun tidak sempurna, makalah ini menggunakan istilah "Global North" (Utara Global)/"Global South" (Selatan Global) karena meskipun secara geografis belum tentu benar, kedua istilah ini mencerminkan sifat kemiskinan dan ketidaksetaraan global yang saling terkait (McEwan, 2019).

Bab 4 membahas tentang inovasi yang dipimpin masyarakat sebagai pendekatan unik untuk inovasi kemanusiaan, berdasarkan pengalaman dan perspektif dari dalam CLIP. Inovasi ini menerapkan teori-teori pascakolonial untuk berpikir dan berlatih di dalam CLIP dan menjadikannya konteks dalam agenda inovasi kemanusiaan yang lebih luas serta perdebatan seputar dekolonisasi dan lokalisasi.

Draf makalah ini sebagian besar dibuat oleh Isabel Medem dan Ian McClelland di Elrha. Kami, para penulis, menyadari bahwa sementara perdebatan tentang bantuan dekolonisasi saat ini populer di sektor pembangunan dan kemanusiaan berbahasa Inggris, perdebatan ini sudah lebih lama mendapat sorotan di Global South. Sebagai aktor di Global North, kepentingan kami dalam masalah ini berisiko direndahkan, dipaksakan pada orang lain, dan/atau kurang informasi. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjadi "hiper renung diri", yang berarti bahwa kami terus-menerus dan berhati-hati merenungkan bagaimana pekerjaan kami "terkait erat dengan posisi kami (sosial ekonomi, gender, budaya, geografis, sejarah, kelembagaan)" (Kapoor, 2004).

Pada saat yang sama, kami berusaha untuk menghindari kritik yang berpusat pada diri sendiri, yang dapat mencegah kami mendengarkan dan melihat serta menerima kenyataan yang tampaknya bertentangan. Kami yakin bahwa tidak memandang remeh dekolonisasi sektor kemanusiaan berarti memahami bahwa diskusi itu sendiri berisiko berubah menjadi suatu bentuk kekuatan jika hanya ingin mendengar kebenaran tertentu, sambil membungkam yang lain. Misalnya, mengingat tren di sektor pembangunan untuk secara kritis mempertimbangkan kembali semua praktik, kami mungkin belum ingin mendengar apa yang telah berulang kali dikatakan oleh ketiga mitra kami: bahwa pada kenyataannya, kerangka kerja inovasi ini telah berdampak positif pada cara mereka bekerja.

Selangkah lebih jauh, kami tidak hanya bermaksud untuk menyajikan perspektif, terlepas dari apakah itu cocok dengan kritik dekolonial yang diberikan, tetapi juga untuk menarik kesimpulan dari hal ini yang kami gunakan untuk terus memperbaiki pekerjaan kami. Misalnya: meskipun kemanusiaan masih dianggap sebagai upaya netral dan apolitis, kami harus menerima dan menerima kenyataan bahwa semua pekerjaan mitra kami tidak hanya berlangsung dalam dinamika kekuatan politik yang mendalam, tetapi kerangka kerja kami sendiri dapat menjadi ruang untuk keterlibatan politik. Oleh karena itu, dalam seluruh proses penyusunan makalah ini, kami berusaha untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keterlibatan dengan kritik multi-arah terhadap isu-isu yang sedang dihadapi dan keterbukaan terhadap pluralitas perspektif.

1. Developmentalisme dan berbagai teori pascakolonial

Istilah "pascakolonialisme" dapat dipahami berarti "setelah kolonialisme", dan ini menggambarkan dunia setelah negara-negara yang secara formal dikolonisasi (dijajah) mencapai kemerdekaan politik. Faktanya, pengetahuan pascakolonial merujuk kumpulan kerangka kerja dan konsep yang dapat kita gunakan untuk terlibat secara kritis dengan dunia yang masih dibentuk oleh kolonialisme. Dengan fokusnya pada dekolonisasi produksi pengetahuan dan, dengan demikian, kekuasaan, pascakolonialisme kurang peduli dengan pergeseran sejarah dibanding yang diskursif.

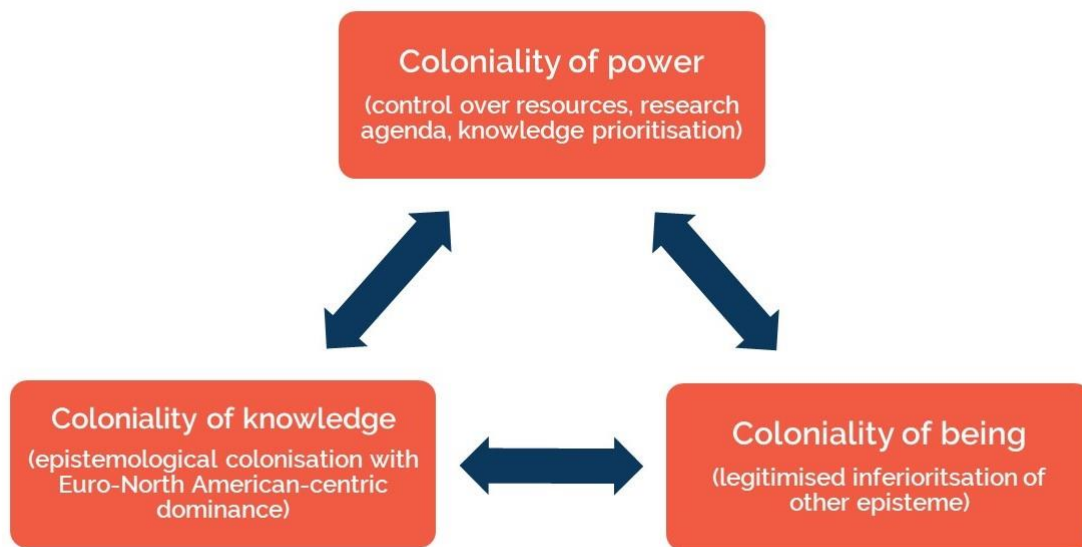
Bidang kompleks teori pascakolonial berusaha untuk:

- mengacaukan wacana dominan tentang bagaimana dunia kita dikenal
- mempertanyakan cara pengetahuan dihasilkan, menanyakan untuk siapa angkat bicara dan oleh siapa
- menulis ulang pencatatan waktu yang dominan (dikenal sebagai sejarah)
- mengganggu distribusi spasial pengetahuan (yang menghasilkan kekuasaan)
- memulihkan suara orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas dengan secara radikal merekonstruksi sejarah dan produksi pengetahuan (McEwan, 2019).

Para cendekiawan pascakolonial sering berfokus pada analisis kolonialitas dalam sastra dan citra, tetapi ini juga merupakan lensa yang kuat untuk mengkritik sektor kemanusiaan dan pembangunan. Sikap teori ini terhadap pengetahuan dan representasi sebagai suatu bentuk kekuasaan (siapa yang diwakili oleh siapa, siapa yang berbicara, yang muncul sebagai subjek dan objek) sangat penting guna memahami kegunaan pascakolonialisme untuk mengkritiknya.

Teori pascakolonial mencurigai "proyek pembangunan", yang dianggapnya sebagai *layar* yang digunakan Global South untuk memproyeksikan dan menciptakan representasi yang tampaknya benar tentang daerah-daerah yang sebelumnya dijajah. Teori ini menganggap pembangunan itu sendiri sebagai bentuk kekuasaan yang ditopang oleh wacana yang sangat khusus yang menempatkan Global North di pusat, sebagai pemegang pengetahuan dan pencetus ide-ide pembangunan yang murah hati, dan Global South berada di pinggir, sebagai pihak yang tidak memiliki pengetahuan dan membutuhkan pembangunan (Mignolo, 2017).

Dengan begitu, menerapkan kritik pascakolonial pada pembangunan, “bertujuan untuk memahami kekuatan ide-ide pembangunan, pengetahuan dan institusi serta konsekuensinya di tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu,” (ibid). Sehubungan dengan pendanaan penelitian kesehatan global, E. S. Koum Besson (2022) merangkum dinamika kolonialitas global dalam hal kolonialitas kekuasaan, pengetahuan dan keberadaan (Gambar 1).³



Gambar 1: Dinamika kolonialitas global. Sumber: Ndlovu-Gatsheni (2014) dalam Koum Besson (2022).

Bagian berikut ini menguraikan beberapa konsep yang paling penting dalam teori pascakolonial yang mematangkan diskusi dan analisis dalam makalah ini.

Kolonialitas

Kolonialitas merujuk penindasan budaya, politik dan ekonomi atas kelompok yang lebih rendah oleh kelompok ras yang dominan, *melampaui masa kekuasaan kolonial*. Dengan demikian, istilah ini menggambarkan hubungan kekuatan global saat ini yang muncul dari imperialisme. Hubungan kekuasaan ini, ketika superioritas, otoritas dan pengetahuan berada di Global North, adalah sejatinya kapitalis, rasis, dan heteronormatif, dan secara langsung telah memengaruhi ide-ide yang spesifik tentang siapa yang dianggap manusia/di bawah taraf manusia (lihat karya A Quijano, W Mignolo dan M Lugones, di antara karya lainnya).

³ Untuk mengetahui definisi epistemologis/episteme, buka halaman 12.

Bagi para cendekiawan pascakolonial, kolonialitas adalah keadaan dunia tempat kita semua hidup, yang dibentuk oleh akibat kolonialisme, bukan sebagai fakta sejarah, tetapi sebagai struktur sentral yang menentukan kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menganggap diri sendiri berada di luar keadaan ini dan, sebaliknya, seseorang harus mulai menyadari sejauh mana kolonialisme telah meresap ke dalam pengetahuan, perilaku dan sikap kita.

Dekolonisasi dan dekolonialitas

Konsep dekolonisasi paling sering dipahami dan digunakan sebagai metafora untuk pembebasan dari penindasan kolonial – yang lalu dan sedang berjalan. Namun, ada penafsiran dan penggunaan istilah ini untuk merujuk pemulihan kedaulatan nasional: “untuk mendekolonisasi” adalah upaya untuk mengembalikan tindakan asli penjajahan dan untuk memulangkan tanah dan kehidupan Pribumi (Tuck & Yang, 2012).

Terkait dengan itu, istilah “dekolonialitas”, yang muncul dari karya para cendekiawan Amerika Latin, seperti A. Quijano, W. Mignolo, M. Lugones yang telah disebutkan sebelumnya, adalah praktik yang secara aktif mempertanyakan hubungan kekuasaan yang saat ini membentuk dunia, khususnya, gagasan bahwa pengetahuan Barat bersifat universal dan superior. Ini adalah tindakan berkelanjutan yang mendorong balik penghapusan pengetahuan dan sejarah orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas.

Epistemologi dan pengetahuan

Epistemologi adalah cabang filsafat yang berusaha memahami hakikat pengetahuan dan apa yang seharusnya diterima sebagai pengetahuan yang dapat diterima (Bryman, 2016). Oleh karena itu, epistemologi mengajukan berbagai pertanyaan tentang apa yang dapat kita klaim sebagai pengetahuan “sejati”, dan metode yang tepat untuk sampai pada pengetahuan tersebut (Heylighen, 1993). Jika seseorang menerima bahwa metode “ilmiah” Barat tidak selalu merupakan satu-satunya cara untuk sampai pada pengetahuan “sejati”, maka bisa jadi ada “pengetahuan” yang berbeda berdasarkan sejarah budaya dan sarana penyelidikan yang berbeda. Pengetahuan menjadi “sah” hanya ketika disajikan oleh dan ada di Global North, di mana proyek penelitian sering disajikan dengan klaim - implisit atau eksplisit - sebagai “yang ‘pertama’ menemukan, melakukan, atau pergi ke suatu tempat” (Liboiron, 2021).

Para ahli teori feminis telah menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah bisa sepenuhnya objektif dan bahwa “mengungkapkan identitas ‘yang mengetahui’ dan sifat ‘mengetahui’ adalah kunci untuk memahami pengetahuan sebagai

bentuk kekuasaan," (Evans dan Madhok, 2014). Mereka beralasan bahwa mengeklaim pengetahuan sebagai universal dan agar peneliti serta yang mengetahui bersikap transparan dalam proses itu tidak hanya tidak benar, tetapi juga suatu bentuk pemanfaatan kekuasaan dengan "membedakan" seluruh wilayah dunia dalam kaitannya dengan pemegang pengetahuan.

Gayatri C Spivak, seorang cendekiawan pascakolonial dan feminis, menciptakan istilah "kekerasan epistemik" (1988) untuk merujuk pembungkaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan penolakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode penyelidikan non-Barat dengan cap "non-ilmiah". Untuk mengatasi ini dan menantang "pandangan dunia dengan keistimewaan", ahli teori sudut pandang, seperti Sandra Harding, menyarankan, "memulai pemikiran dari kehidupan masyarakat yang terpinggirkan." (Evans dan Madhok, 2014)

Developmentalisme

Para cendekiawan pascakolonial menggunakan istilah "developmentalisme" untuk merujuk pemahaman pembangunan sebagai proyek pasca-PD II yang telah mengkonstruksi gagasan keterbelakangan serta aparatus yang dilembagakan yang menghasilkan pengetahuan dan kekuasaan (Escobar, 1995). Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa pembangunan telah menciptakan domain bahasa dan pengetahuan yang memiliki bentuk kekuasaan yang bermasalah karena dapat memutuskan bahwa seluruh wilayah dunia terlihat (dan melihat diri mereka sendiri) sebagai wilayah terbelakang menurut standar sangat khusus yang berakar pada penjajahan.

Aparatus bantuan dan pembangunan bekerja melalui bahasa "profesionalisme" yang akhirnya "menetralisir atau mendepolitisasi aktivisme dan gerakan sosial" dengan mengunci seluruh populasi ke dalam statistik dan indikator, dan dengan menempatkan mereka pada pemahaman yang linear tentang waktu dan kemajuan dalam kaitannya dengan Global North (*Time to Decolonise Aid, 2021*). Akibatnya, pendekatan berbasis hak dikaburkan, dan percakapan dibingkai dalam kaitannya dengan "bantuan", bukannya "perbaikan sistemik untuk kekerasan yang ditimbulkan di masa lalu imperial dan kolonial banyak negara donor." (ibid)

Kolonialitas gender

Gender dianggap sebagai kategori penting dalam teori pascakolonial karena telah memainkan peran penting dalam penciptaan apa yang dipahami sebagai manusia. Sepanjang kolonialisme, orang-orang dikategorikan sebagai manusia dan di bawah taraf manusia, sehingga memungkinkan yang satu mendominasi yang lainnya. Lugones berpendapat bahwa melalui gender, kemudian ras, taraf

non-manusia ditetapkan: pria kulit putih Eropa adalah manusia seutuhnya; wanita kulit putih Eropa bukanlah manusia seutuhnya dan hanya ada sehubungan adanya pria; dan mereka yang dijajah dan diperbudak tidak mencapai taraf manusia, bukan hanya karena mereka tidak berkulit putih; melalui konstruksi mereka sebagai *male* (jantan) atau *female* (betina), dan bukan laki-laki atau perempuan, orang-orang yang terjajah dianggap bukan manusia (Lugones, 2008).

Seperti yang dinyatakan oleh banyak cendekiawan feminis, gender bukanlah kategori tunggal, tetapi salah satu yang bersinggungan dengan hubungan dan sistem kekuasaan lain, seperti ras, kelas, seksualitas, bangsa dan disabilitas (Crenshaw, 1989). Oleh karena itu, gender memainkan peran penting dalam setiap analisis pascakolonial dan pembangunan, misalnya: dengan menunjukkan bahwa konsepsi pembangunan tentang "perempuan Dunia Ketiga" memperlakukan kelompok ini sebagai penerima pasif, bukannya agen aktif (Mohanty, 2003).

Tantangan terhadap pascakolonialisme

Terlepas dari kekuatan kritik pascakolonial, juga telah ditunjukkan bahwa pascakolonialisme tidak memadai dalam menangani "pengalaman hidup dan realitas material pascakolonialitas". (McEwan, 2019). Ini berfokus pada bahasa dan representasi sementara mengabaikan realitas hidup orang-orang yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan yang ditunjukkan persis oleh pascakolonialisme. Karena begitu banyak cendekiawannya yang terkemuka bekerja untuk berbagai universitas di Global North, pascakolonialisme juga telah "dituduh menjadi dilembagakan, mewakili kepentingan elit intelektual metropolitan, berbasis Barat [...] yang melanggengkan pengucilan kaum terjajah dan tertindas" (berbagai penulis dalam McEwan, 2019). Pada saat yang sama, ada sejumlah cendekiawan pascakolonial yang bekerja di universitas-universitas Global South, tetapi bagi mereka, mengakses jurnal-jurnal akademis terkemuka menjadi sebuah tantangan. Ini bukan hanya karena alasan linguistik, tetapi juga karena sistem mengakses jurnal akademik itu sendiri, yang politiknya tentang tinjauan sejawat, tuntutan rekan penulis, dan jalan menuju publikasi menghadirkan rintangan besar bagi para cendekiawan dari Global South (antara lain, baca: Bhaumik S. & Jagnoor J., 2019).

2. Wacana dominan dan cara kerja inovasi kemanusiaan

Inovasi bukanlah hal baru dalam paham kemanusiaan. Tetapi ada perbedaan antara inovasi sebagai hasil dan inovasi sebagai proses disengaja yang proaktif (Ramalingam, Scriven & Foley, 2009). Seperti yang dinyatakan oleh Obrecht dan Warner (2016), "Walaupun inovasi selalu menjadi aspek intrinsik dari tindakan kemanusiaan, pengakuan sistematis dan studi inovasi baru-baru ini, terkait dengan pergeseran yang lebih luas dalam penerapan teori manajemen inovasi oleh aktor kemanusiaan dari luar sistem."

Konsepsi inovasi kemanusiaan saat ini sering ditelusuri kembali ke "pameran inovasi" rapat tahunan ALNAP 2009, yang diikuti oleh keluarnya makalah yang berpengaruh, *Innovations in International Humanitarian Action* (Ramalingam, Scriven & Foley, 2009). Humanitarian Innovation Fund di Elrha didirikan pada tahun 2011, dan dalam beberapa tahun proliferasi dana, program dan "laboratorium" bermunculan di PBB dan sistem kemanusiaan yang lebih luas (Sandvik, 2017). Pada tahun 2016, "Transformasi melalui Inovasi" menjadi salah satu tema utama KTT Kemanusiaan Dunia di Istanbul, ini menetapkan konsep di inti pembuatan kebijakan kemanusiaan.

Untuk memahami dinamika kekuasaan dan otoritas yang melekat dalam inovasi kemanusiaan, serta maknanya dalam wacana dominan, akan sangat membantu untuk mempelajari tiga bidang kritik yang menonjol:

- kekuasaan atas alokasi sumber daya
- cara masalah dan solusi dibentuk
- metode dan pendekatan yang dianggap termasuk dalam inovasi kemanusiaan.

Kekuasaan atas sumber daya

Pada tahun 2017, pemetaan global ekosistem inovasi dan penelitian kemanusiaan menemukan bahwa sebagian besar penyandang dana dan penerima dana penelitian dan inovasi berkantor pusat di Eropa dan Amerika Utara, dengan konsentrasi tinggi di Britania Raya dan Amerika Serikat (Gelsdorf dkk, 2017). Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa OMS dan LSM lokal di negara-negara penerima bantuan menghasilkan kurang dari 1% dari volume penelitian kemanusiaan dan hasil inovasi yang terlihat melalui tinjauan berbasis hasil publikasi (Elrha, akan datang).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa OMS dan LSM lokal tidak cukup mampu mengakses sumber pendanaan untuk inovasi dan penelitian kemanusiaan, dan bahwa pekerjaan mereka kurang terwakili dalam materi sumber. Ini selaras dengan konsep "pengutamaan" yang disebutkan sebelumnya oleh para cendekiawan di Global North, di mana inisiatif inovasi yang didorong secara lokal atau regional mungkin tidak diakui karena tidak ditemukan, diproduksi atau dibiayai oleh praktisi dari Global North.

Karena "inovasi kemanusiaan" terutama dibentuk dan diputuskan oleh para aktor di Global North, dapat dikatakan bahwa organisasi besar yang bermarkas di Global North telah mempertahankan kekuasaan atas sumber daya dan sebagian besar telah mengambil manfaat dari pengetahuan yang dihasilkan melalui inovasi kemanusiaan. Hal ini membuat Global South terancam untuk tetap menjadi tempat di mana inovasi diterapkan, tetapi di mana organisasi lokal tetap menjadi penerima pasif dari sebagian pengetahuan ini, dengan penurunan kekuatan untuk menentukan nasib sendiri.

Membingkai masalah dan solusi

Kristin Sandvik (2017) berpendapat bahwa fitur utama inovasi kemanusiaan, "adalah peralihan tegas ke pasar dan teknologi baru sebagai katalis untuk perubahan dan peningkatan di bidang kemanusiaan." Ini, pada gilirannya, berarti bahwa "cara ketika masalah dibingkai, solusi diusulkan, dan pemangku kepentingan mendapatkan relevansi dan kredibilitas telah berubah secara drastis ... penekanan retorik pada keadilan sosial, pemberdayaan, dan partisipasi yang ditekankan dengan pendekatan berbasis hak tidak ada," (ibid).

Tom Scott-Smith (2016) demikian juga mencirikan inovasi kemanusiaan sebagai "neofilia kemanusiaan" yang menempatkan teknologi dan keyakinan "neoliberal" di pasar sebagai pusat upaya untuk mendorong perubahan. Dia berpendapat bahwa inisiatif inovasi, "berisiko mengurangi masalah kemanusiaan yang kompleks, yang membutuhkan keterlibatan politik dan memiliki sudut sosial yang signifikan, untuk penyediaan barang-barang material." Paling buruk, mereka menggabungkan antusiasme yang berlebihan dengan kurangnya pemahaman; jauh dari "perubahan permainan", mereka hanya menawarkan perbaikan kecil pada kehidupan masyarakat," (ibid).

Pemahaman yang berpusat pada teknologi dan produk ini dicerminkan oleh *The State of the Humanitarian System report 2022*, ALNAP, yang selain menyebutkan inovasi dari aktor non-tradisional dan lokal, menekankan inovasi operasional oleh aktor internasional, seperti peningkatan sistem informasi dan teknologi pengumpulan data digital, serta inovasi program, seperti solusi EdTech dan kartu biometrik untuk distribusi NFI, voucher dan makanan (ALNAP, 2022).

Berbagai metode dan pendekatan

Mark Duffield (2019) berpendapat bahwa agenda inovasi kemanusiaan telah melihat dan mengalami desain menggantikan politik. Andrea Jiminez dan Tony Roberts (2019) menyoroiti pengaruh Silicon Valley dalam konsepsi dan pemahaman umum tentang inovasi. Mereka mencirikan pendekatan gaya Silicon Valley sebagai “acara *hackathon* dan *pitching* yang ... menilai inovasi dalam hal apakah itu dapat dipatenkan, dapat dimonetisasi, atau dapat diskalakan, serta menghitung nilai inovasi sebagai imbal hasil investasi dolar.”

Memang, pendekatan “lean startup” yang berasal dari Silicon Valley – yang mendorong eksperimen drastis dan pengujian pengguna – telah digunakan untuk menggambarkan seluruh generasi pendanaan dan dukungan untuk inovasi kemanusiaan (McClure, 2019). Ann Mei Chang, mantan eksekutif Google dan Chief Innovation Officer di USAID, menerbitkan buku berjudul *Lean Impact* (2019) yang secara eksplisit diambil dari berbagai studi kasus di sektor pembangunan dan kemanusiaan. Bukunya menegaskan dukungan untuk Frontier Technologies Hub dari Foreign, Commonwealth & Development Office Britania Raya (Vigoureux, 2020).

Pendekatan berdasarkan desain, seperti “pemikiran desain”, “desain yang mengutamakan manusia” dan “desain yang mengutamakan pengguna” semuanya telah dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan praktik kemanusiaan dan secara bermakna melibatkan orang-orang yang terkena dampak krisis dalam merancang produk dan layanan kemanusiaan.⁴ Sejumlah pelaksana dan penyandang dana kemanusiaan telah secara eksplisit menggunakan dan mempromosikan pendekatan ini, termasuk User-Centred Sanitation Challenge Elrha (Sandison, 2017), Start Network dan Disaster and Emergency Preparedness Programme Innovation Labs (DEPP Labs) CDAC Network (Konda dkk, 2019), dan Mobile for Disaster Fund dari Global System for Mobile Communications Association (Hamilton dkk, 2020).

⁴ Baca Bourne (2019) untuk uraian lebih lanjut tentang konsep-konsep ini dan penerapannya dalam sektor pembangunan dan kemanusiaan.

3. Menyegarkan konsep inovasi kemanusiaan

CLIP – dan para pendahulunya, seperti Start Network dan DEPP Labs dari CDAC Network dan pekerjaan Elrha bersama para anggota ADRRN – memberikan kesempatan untuk menilai kembali makna dan praktik inovasi kemanusiaan. Bagian berikut ini menguraikan perspektif tentang para mitra operasional CLIP seperti yang diungkapkan oleh tim kepemimpinan mereka (umumnya perempuan).

ASECSA – Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Guatemala)

Tim kepemimpinan ASECSA di Guatemala dibangun dengan dasar yang kuat pada feminisme, gender, dan kritik pascakolonial. Perspektif kami berakar pada komitmen yang disuarakan dengan kuat terhadap kosmovision kaum Maya dan filosofi *buen vivir* Amerika Latin. Dalam filosofi ini, kesejahteraan tidak dipahami dalam arti individualistis, tetapi diakui sebagai "hanya mungkin di dalam komunitas. Lebih jauh lagi, dalam pendekatan pada umumnya, konsep komunitas dipahami dalam pengertian yang lebih luas, termasuk alam" (Gudynas, 2011).

Keberadaan Guatemala ada sejak kolonisasi oleh Spanyol sehingga ASECSA melihat negara itu sendiri sebagai struktur kolonial yang telah memaksakan keberadaan dan cara berpikir tertentu, dan berusaha menghilangkan identitas masyarakat Pribumi. Negara genosida, rasis, diskriminatif dan patriarki telah menciptakan situasi di mana masyarakat Pribumi mengalami kesulitan dalam menjalankan hak-hak dasar, seperti kehidupan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan gaji yang bermartabat.

Di dalam konteks ini, ASECSA melihat CLIP sebagai penyedia cara baru yang ampuh bagi masyarakat Pribumi untuk melawan *status quo* ini. Melalui CLIP, asosiasi ini telah menerapkan pendekatan yang sangat partisipatif yang melibatkan dialog mendalam dan renungan kolektif, mendukung keterlibatan anggota masyarakat yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan bersama, terutama perempuan, pemuda, anak-anak dan lanjut usia.

Dengan menerapkan pendekatan yang berfokus pada perspektif dan tindakan masyarakat, ASECSA telah menyaksikan orang-orang mulai secara kritis menganalisis realitas mereka dan penyebab-penyebab yang mendasarinya. Jenis

pembelajaran, pengaturan dan tindakan yang inklusif dan kolektif ini, yang memotivasi anggota masyarakat untuk mencari solusi mereka sendiri, telah menciptakan dinamika di mana orang-orang yang sebelumnya terpinggirkan mulai mengakui diri mereka sebagai subjek hak.

Pendekatan CLIP kontras dengan cara kerja biasa di organisasi non-pemerintah (LSM), di mana proyek telah ditentukan sebelumnya dan kemudian diterapkan dalam komunitas dengan sedikit keterlibatan orang-orang yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat. Dengan demikian, inovasi kemanusiaan telah menjadi kendaraan di mana komunitas yang bekerja dengan ASECSA dapat berbicara dan melawan negara, dan di Guatemala ini merupakan kekuatan kolonial yang lebih menindas dibanding sektor kemanusiaan internasional.

CDP – Center for Disaster Preparedness (Filipina)

CDP telah menjadi yang terdepan dalam pengurangan risiko bencana dan iklim berbasis masyarakat (DRR) dan manajemen selama lebih dari 20 tahun. Kami telah mengamati dinamika kekuatan kolonial yang jelas di sektor kemanusiaan internasional ketika Global North memutuskan masalah apa yang harus didukung dan di mana. Hal ini menyebabkan pembangunan dibentuk oleh mereka yang memiliki sumber daya, bukan negara “penerima”.

Hubungan antara donor global dan pimpinan LSM lokal di Filipina kerap kali tidak seimbang. LSM lokal adalah mitra pelaksana atau subkontraktor layanan dan hasil yang dibutuhkan oleh donor, tetapi jarang diperlakukan sebagai ahli. Walaupun LSM lokal ditugaskan untuk melaksanakan proyek, mereka bukan bagian dari perancangan atau penetapan agenda. Hal ini berimplikasi langsung pada keberlanjutan kerja CDP karena posisi penerima yang pasif menghambat perencanaan jangka panjang. Para donor dari Global North menguraikan hasil yang diinginkan dan membiarkan LSM lokal mengajukan proposal untuk mencerminkan prioritas ini.

Bagi CDP, ada pembagian peran yang jelas di antara para aktor kemanusiaan yang mencerminkan garis kekuasaan kolonial sebelumnya. Ini berarti bahwa aktor lokal atau regional, seperti CDP, tidak memiliki banyak hak bicara dalam menetapkan fokus bantuan di negara mereka, sehingga masyarakat yang terkena dampak langsung dari pekerjaan mereka tidak dapat bersuara.

Serupa dengan ASECSA, CDP melihat CLIP sebagai peluang untuk mendekolonisasi. Sebenarnya, pelokalan melalui inovasi kemanusiaan berjalan seiring dekolonisasi dengan:

- memberdayakan masyarakat untuk menentukan masalah dan prioritas bagi diri mereka sendiri

- melibatkan para aktor lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai fase inovasi
- berbagi kapasitas dan belajar melalui kegiatan-kegiatan ini.

Semua elemen inovasi berbasis komunitas ini berpotensi untuk menghidupkan komunitas yang dinamis yang tidak lagi melihat dirinya sebagai penerima bantuan belaka. Mengakui bahwa masyarakat memiliki aset untuk diandalkan – termasuk modal keuangan, non-keuangan, manusia dan sosial – membangun kepercayaan diri untuk menegaskan dan menerapkan solusi yang dipimpin masyarakat.

Mengingat parameter dan kondisi bantuan yang terbatas, CDP berupaya untuk memastikan bahwa pendanaan dan pelaksanaan proyek sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Inilah alasan utama CDP mengembangkan pendekatan partisipatif dan memusatkannya dalam setiap keterlibatan. Sejak awal, CDP telah merintis PRB dan manajemen berbasis masyarakat yang inklusif di seluruh Filipina dalam semua proyek dan komunitas mitranya, dan ini meletakkan dasar untuk perencanaan, tindakan, dan penilaian risiko yang dipimpin masyarakat.

CDP juga menerima tantangan untuk menjembatani penyandang dana/fasilitator dan masyarakat. Di tingkat masyarakat, praktik yang baik membutuhkan solusi pembangunan lokal yang telah dipastikan terhadap risiko dan bahwa dukungan pendanaan harus mendorong atau meningkatkan – bukan membatasi – potensi masyarakat. CDP melibatkan penyandang dana/fasilitator untuk bekerja secara fleksibel berdasarkan aspirasi lokal, sambil tetap menyadari tujuan jangka panjang setiap proyek sehingga organisasi masyarakat, pemerintah dan mitra swasta dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan dapat ditiru.

YEU – Yakkum Emergency Unit (Indonesia)

YEU menyambut baik pemikiran tentang kolonialisme dengan cara yang telah dibahas di dalam makalah ini. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kapoor dan Rahmawati (2022), YEU telah menghadapi beberapa tantangan ketika bermitra dengan organisasi dan donor Barat, seperti mekanisme kepatuhan yang tidak sesuai secara budaya, “meremehkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman lokal, dan fokus pada ‘pengembangan kapasitas’ satu arah daripada saling belajar.”

Misalnya, ketika bekerja dengan sektor bantuan kemanusiaan, sebagian besar metode, pendekatan, dan alat evaluatif, seperti kerangka log, alat pengumpulan data, dan laporan naratif telah diadopsi dari literatur pembangunan Global North. Sebagian besar memberikan sedikit ruang bagi para aktor lokal untuk fleksibel dan kreatif dalam menggunakan pendekatan lokal untuk produksi pengetahuan, misalnya: mendongeng atau menyanyi. Dalam hal ini, YEU mengakui tingkat

ketidakadilan epistemik; hanya bentuk pengetahuan budaya tertentu yang "penting" sementara yang lain dinyatakan tidak sah atau tidak memadai.

Ketidakadilan epistemik juga terjadi dalam kaitannya dengan persyaratan proyek yang didasarkan pada "standar global" tanpa konsultasi lokal dan analisis kontekstual. Contoh: YEU membangun fasilitas air, sanitasi dan kebersihan yang dibiayai oleh donor dari Global North. Di Indonesia, seperti di banyak bagian dunia lainnya, cuci tangan tidak dilakukan di ruangan yang sama dengan kamar kecil. Namun, ini adalah standar kebersihan internasional dan karenanya fasilitas YEU tidak lulus evaluasi donor, meskipun memenuhi semua standar lokal.

Walaupun standar kebersihan internasional dapat dikatakan sebagai hal yang baik secara umum, sangat mengejutkan bahwa apakah sesuatu memenuhi standar kebersihan global hanya dinilai dari keberadaannya pada saat pemeriksaan, bukan berdasarkan apakah digunakan dengan cara yang dimaksudkan. CLIP menawarkan kesempatan untuk memastikan bahwa penilaian berdasarkan pemenuhan tujuan akan berlaku pada inovasi.

4. Jalan ke depan

Seperti disebutkan di atas, kritik pascakolonial adalah tentang memahami dan menantang kekuatan ide, pengetahuan dan institusi. Dalam hal inovasi kemanusiaan, maknanya sebagian besar telah dibentuk di Global North, dicirikan oleh pendekatan berbasis pasar dan fokus yang diilhami oleh Silicon Valley pada kewirausahaan dan desain. Sebagai konstruksi yang sebagian besar dikembangkan oleh dan untuk badan-badan internasional yang berbasis di Global North, kekuasaan atas alokasi sumber daya juga sebagian besar dikuasai di Global North, bersama dengan manfaat produksi pengetahuan.

Tapi ini bukan akhir dari cerita. Prinsip utama agenda inovasi kemanusiaan adalah praktik pembelajaran dua putaran, dan ini melibatkan “buah pikiran tentang kesesuaian praktik, kebijakan, dan norma yang ada dalam suatu organisasi” (Ramalingam, Scriven dan Foley, 2009). Proses renungan untuk buah pikiran dan pertimbangan ulang praktik yang sudah ada ini tidak mengamanatkan rangkaian perangkat atau pendekatan tertentu. Hal ini berpotensi memunculkan ruang-ruang baru, di samping makna-makna baru untuk inovasi kemanusiaan.

Sesuai definisi, CLIP berusaha untuk membalik peran-peran yang biasanya tampil dalam bantuan kemanusiaan. Sebagai ganti aktor dari Global North memaksakan program dan proyek ke organisasi atau komunitas di Global South, tujuan CLIP adalah agar masyarakat memimpin pencarian solusi inovatif untuk tantangan yang mereka hadapi, dan dipandu melalui proses itu oleh organisasi lokal yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat atau komunitas tersebut. Para mitra di Global North – Elrha, Start Network dan Tokyo Innovation Hub ADRRN – tetap berada di latar belakang sebagai donor dan sebagai fasilitator.

Seperti yang ditunjukkan oleh makalah ini, masing-masing mitra CLIP membawa pemahaman dan perspektif yang berbeda tentang sektor kemanusiaan pada umumnya, dan inovasi kemanusiaan pada khususnya. Kita semua perlu mempertanyakan asumsi dan belajar untuk melakukannya. Bersama-sama, kami bertujuan untuk menawarkan alternatif makna dominan untuk inovasi kemanusiaan saat ini. Dengan mengingat hal itu, kami telah mengidentifikasi empat karakteristik inti yang saling berhubungan dari praktik kami di CLIP yang mendukung upaya kami untuk menyegarkan konsep inovasi kemanusiaan sebagai cara untuk membina lokalisasi dan kepemimpinan lokal.

Inovasi dengan pengambilan keputusan lokal

Proposal awal untuk CLIP pada umumnya dibuat oleh Elrha dan Start Network, dengan pembahasan bersama Foreign, Commonwealth & Development Office Britania Raya, masukan dari Tokyo Innovation Hub ADRRN. Tetapi pengambilan keputusan CLIP seputar prioritas strategis dan alokasi pendanaan di tingkat negara dan masyarakat telah dilimpahkan kepada CDP, YEU dan ASECSA. Walaupun pendanaan harus dialokasikan untuk "inovasi", hal ini memberikan kebebasan kreatif yang besar untuk memutuskan bagaimana dan di mana harus berinvestasi.

Di seluruh CLIP, kami sedang dalam perjalanan untuk mendistribusikan kekuatan dalam keputusan pendanaan kami dan dukungan kami untuk inovasi kemanusiaan, contoh: melalui penggunaan hibah partisipatif. Perjalanan kami menegaskan laporan GrantCraft tentang pergeseran kekuasaan melalui pemberian hibah partisipatif, yang menjelaskan bagaimana pemberian hibah partisipatif mengubah peran penyandang dana "dari penengah atas apa yang dilakukan menjadi fasilitator proses yang mereka bekerja sama dengan organisasi lain dan non-pemberi hibah untuk menentukan prioritas dan aksi" (Gibson, 2018).

Proses perubahan ini berbeda di setiap negara CLIP, di mana pendanaan didistribusikan melalui tunjangan bagi mereka yang berpartisipasi dalam proyek-proyek di Guatemala, dan melalui hibah di Filipina dan Indonesia.

Di Guatemala, ASECSA telah menggunakan acara pelibatan masyarakat, termasuk instalasi seni, untuk mengumpulkan anggota masyarakat seputar masalah tertentu. Sebuah komite masyarakat, termasuk perwakilan ASECSA, otoritas kota dan pemerintah daerah, kemudian memilih inisiatif mana yang akan menerima dukungan keuangan yang masih berlangsung.

Di Filipina, CDP telah berusaha untuk menyeimbangkan pendekatan yang dipimpin masyarakat dengan upaya untuk melibatkan dan memastikan dukungan dari pemangku kepentingan yang lebih luas. Proses multistap ini melibatkan tinjauan awal oleh staf CDP sebelum proses pemilihan skor berikutnya untuk memastikan seleksi. Proses ini menyeimbangkan tinjauan oleh panel perwakilan masyarakat (dengan bobot keputusan sebesar 45%), tinjauan sejawat antara pelamar terpilih (22%) dan tinjauan oleh orang-orang dengan keahlian teknis terkait proyek (33%). Di Indonesia, YEU telah mengambil pendekatan yang serupa untuk pengambilan keputusan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta organisasi masyarakat sipil lainnya, yang mewakili sektor disabilitas, kemanusiaan, berbasis keyakinan, akademik dan PRB.

Inovasi yang terlibat secara politik

Seperti yang dinyatakan oleh International Development Innovation Alliance, "Inovasi ... secara inheren bersifat politis ... Inovasi berarti mengubah *status quo*, dan ini mungkin berarti hilangnya hak istimewa bagi sebagian orang," (Kumpf, Strandberg & Barkell, 2021). Lebih lanjut, aliansi ini menyuarakan kembali sentimen sebelumnya tentang pengaruh pendekatan Silicon Valley terhadap cara pemahaman inovasi di Global North, dan marginalisasi "gerakan sosial, komunitas pribumi, inovator akar rumput, serta pemain lain dari Global South yang mengejar pendekatan inovasi yang berbeda dan menyajikan visi yang sangat berbeda untuk masa depan." (ibid).

Di CLIP, pendekatan inovasi yang dipimpin masyarakat telah berdampak menciptakan ruang baru yang memberikan ruang bagi aspek politik pengaturan dan aktivisme masyarakat serta pembudayaan kewirausahaan sosial dan pemecahan masalah. Di Filipina, fokus CPD ada pada inovasi yang dipimpin masyarakat yang telah memberi masyarakat sarana untuk berinteraksi dengan Unit Pemerintah Daerah secara konstruktif. Hal ini juga memberikan tingkat visibilitas dan kekuatan kolektif di mana masyarakat dapat menantang pihak berwenang dan berusaha untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.

Dalam hal ASECSA di Guatemala, anggota masyarakat telah didorong dan didukung untuk melihat diri mereka sebagai subjek hak melalui keterlibatan dengan program, dan melalui pemahaman ini mereka lebih mampu mengembangkan wawasan baru tentang situasi dan kekuatan mereka untuk mengakses hak-hak mereka. Jadi, meski pekerjaan kami di CLIP difokuskan pada penciptaan aktual atas produk, layanan dan ide inovatif untuk menangani masalah yang berkaitan dengan aksi kemanusiaan, proses pekerjaan ini adalah pengaturan masyarakat dalam ruang pemikiran kolektif yang berinteraksi secara kuat dengan pemangku kepentingan dalam sektor bantuan nasional maupun internasional.

Penting untuk diketahui bahwa bentuk masyarakat yang dinamis dan berdaya yang digambarkan oleh ASECSA dan CDP, ketika orang termotivasi untuk menyelesaikan masalah sendiri, bukannya mengandalkan bantuan dari luar, bukanlah hal aneh secara umum – tetapi tidak biasa dalam batas-batas sektor bantuan. Dari perspektif ini, inovasi yang dipimpin masyarakat menciptakan ruang yang agak baru, yang dapat menampung aktivisme serta pekerjaan pembangunan yang berkelanjutan dan kolektif bagi masyarakat, dan kolaborasi dapat terjadi bersama negara, terlepas dari negara, dan bahkan bertentangan dengan negara. Dengan kata lain, ini membuka cara kerja, di mana masyarakat dapat menentukan kebutuhan mereka sendiri, mengusulkan solusi, dan secara aktif menantang kolonialisme dalam prosesnya.

Inovasi yang mendengarkan, dan mengakui kekuatan, masyarakat

Seperti yang telah dinyatakan oleh CDP, YEU dan ASECSA, CLIP telah menciptakan cara baru untuk bekerja bersama masyarakat, di mana mereka diundang secara aktif untuk berbicara dan – yang terpenting – didengarkan dan didukung untuk bertindak. Ini kontras dengan pendekatan tradisional, di mana proyek masyarakat dirancang dan dilaksanakan tanpa konsultasi dan keterlibatan lokal yang mendalam, acap kali oleh pihak luar. Menurut CDP, YEU dan ASECSA, perubahan perspektif ini telah menciptakan platform yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk berbicara dan melawan pengabaian sektor bantuan dan/atau pemerintah.

Dengan demikian, pendekatan inovasi yang dipimpin masyarakat memungkinkan, dan bahkan mendesak untuk, keterlibatan aktif dengan masyarakat, yang berpusat pada rasa hormat terhadap pengetahuan dan pengalaman orang-orang yang terkena dampak krisis, termasuk masyarakat Pribumi dan minoritas. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana inovasi kemanusiaan, ketika diterapkan secara lokal dan proaktif, dapat memasukkan aspek-aspek dekolonial.

Seperti yang telah kami catat sebelumnya, keterlibatan dengan pascakolonialisme sangat berharga karena ini menghadapkan kita dengan struktur kekuasaan kolonial yang mendalam dari pembangunan dan bantuan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sektor ini bukan hanya produk dari Eropa atau AS, tetapi dibentuk secara kental oleh perlawanan terhadap dan pihak-pihak di dalamnya. Dengan kata lain, salah satu jalan keluar dari ketidakberdayaan yang terkadang dirasakan ketika berusaha mendekolonisasi bantuan kemanusiaan adalah dengan memahami pentingnya untuk secara drastis melakukan pemulihan suara, pengetahuan, dan perspektif mereka yang terpinggirkan dan tertindas. Berbagai ruang inovasi yang dibuat oleh ASECSA, CDP dan YEU menghadirkan kemungkinan ini.

ASECSA, khususnya, mencatat bahwa lokakarya dan kegiatan komunitasnya telah membuat anggota komunitas yang biasanya tidak mengajukan ide atau angkat bicara – seperti perempuan, kaum muda, dan lanjut usia – perlahan-lahan mulai bersama-sama menciptakan solusi komunitas. Dalam beberapa kasus, perempuan telah mengambil peran kepemimpinan, yang tidak terpikirkan sebelum kehadiran CLIP. Bentuk komunitas tempat mereka bekerja perlahan-lahan mulai berubah sebagai buah penentuan pendekatan oleh para mitra CLIP terhadap komunitasnya masing-masing, dan menerapkan pendekatan ini dari waktu ke waktu.

Tantangan dalam mencoba menerapkan lensa pascakolonial kritis untuk pekerjaan CLIP adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara rekonstitusi epistemik (Mignolo, 2017) dan mengekstraksi pengetahuan lokal untuk kepentingan Global North tanpa imbalan apa pun. Mencoba untuk memegang lensa kritis kritik pascakolonial atas inovasi kemanusiaan dan untuk memulihkan serta terlibat dengan pengetahuan masyarakat adalah proses berkelanjutan yang dapat membantu kita mulai membedakan konsep yang berlapis-lapis untuk gender, atau interseksionalitas (Crenshaw, 1989). Konsep ini menggambarkan fakta bahwa beberapa perempuan berjuang melawan penindasan penganut seksisme dalam komunitas mereka maupun penindasan negara atas status mereka sebagai anggota perempuan komunitas Pribumi atau agama, atau penindasan oleh kota madya setempat jika menjadi aktivis politik.

Kami percaya bahwa cara-cara yang telah digunakan oleh ASECSA, CDP dan YEU untuk menerapkan konsep inovasi kemanusiaan yang diperoleh melalui CLIP memberikan ruang untuk memperumit sistem penindasan yang dihadapi komunitas, dan ini diperlukan jika kita ingin benar-benar mengatasinya. Cara mereka bekerja bersama masyarakat dan inovasi memungkinkan perempuan – baik perempuan yang memimpin tim kemitraan maupun perempuan di dalam masyarakat – untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Ini menantang pemahaman monolitik tentang “perempuan Dunia Ketiga” sebagai objek pasif yang menunggu pembangunan (Mohanty, 2003) serta gagasan yang lebih baru tentang wanita sebagai “pelaku kewiraswastaan yang sangat rajin” (Wilson, 2013), di mana “pemberdayaan” mereka bukanlah masalah keadilan, tetapi semata-mata ekonomi cerdas.

Inovasi berbasis kekuatan

Bantuan kemanusiaan sebagian besar didorong oleh pola pikir berbasis kebutuhan (atau defisit), yang berasal dari misi inti untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa yang segera kepada orang-orang yang terkena dampak krisis. Namun, dalam krisis kompleks yang berlarut-larut dan berulang, pola pikir ini – yang dibentuk dalam desakan pekerjaan yang menyelamatkan jiwa – bisa menjadi tidak dipertanyakan dan menjadi standar, bahkan ketika keadaan membutuhkan pendekatan yang berbeda.

CLIP didirikan dengan pengakuan bahwa masyarakat memiliki kekuatan dan aset penting yang membekali diri mereka untuk memimpin rancangan inisiatif lokal dan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mendukung ketahanan dan tanggap darurat. Para mitra CLIP bertujuan untuk bertemu orang-orang dengan kedudukan setara, bukannya penerima manfaat. Pendekatan berbasis kekuatan (atau berbasis aset) ini juga berakar pada pemikiran inovasi, dengan konsep seperti “inovasi yang dipimpin pengguna” atau “inovasi yang

diarahkan pengguna" yang menggambarkan banyak contoh produk dan layanan baru yang diadaptasi dan dikembangkan oleh pengguna itu sendiri.

Pola pikir berbasis kekuatan ini bergema di seluruh CLIP. Di Filipina, CDP merujuk masyarakat sebagai mitra, bukan penerima manfaat. Hal ini berkaitan dengan konsep *bayanihan*, sebuah kata dari bahasa Tagalog yang dapat diterjemahkan sebagai "kerja sama kolektif" atau "tindakan kerja sama" (Ealdama, 2012). *Bayanihan* sering diserukan setelah krisis, termasuk oleh Presiden Benigno Aquino III yang meminta semua orang Filipina untuk mempraktikkan semangat ini tepat sebelum Topan Haiyan melanda (Su & Mangada, 2016).

Yolanda Ealdama, Associate Professor di University of the Philippines, mempromosikan *bayanihan* sebagai pendekatan berbasis kekuatan untuk pekerjaan sosial, yang menekankan keterampilan dan kapasitas orang dan komunitas, bukannya kekurangan mereka (Ealdama, 2012). Dalam mengembangkan pendekatan ini, Ealdama merujuk beberapa konsep Pribumi terkait, termasuk *kakugui* ("untuk melakukan pekerjaan dengan bijaksana tanpa merusak lingkungan"), *patugsiling* ("untuk melihat hal-hal melalui jendela hati nurani, untuk dimasukkan ke dalam hubungan subjektif dengan orang lain") dan *tao* ("nilai dan martabat pribadi manusia") (ibid).

Kesimpulan

Lalu, apakah yang dimaksud dengan inovasi kemanusiaan? Dan peran apa yang dimainkannya dalam memperkuat kolonialitas, atau mendukung praktik dekolonial? Dalam benak para pengkritiknya, inovasi kemanusiaan merupakan agenda yang didorong oleh masyarakat bantuan internasional yang menempatkan teknologi dan ideologi berbasis pasar sebagai pusat upaya untuk mendorong perubahan. Walaupun tantangan-tantangan ini ada benarnya, pada saat yang sama, memang benar bahwa inovasi dapat menciptakan ruang bagi cara kerja alternatif, termasuk pendekatan berbasis masyarakat yang memungkinkan serangkaian prioritas berbeda.

Kami mengakui ketegangan antara inovasi yang dipimpin oleh lokal atau masyarakat dan inovasi yang tertanam di dalam pengetahuan yang terutama dihasilkan oleh praktisi dan cendekiawan dari Global North, berdasarkan konsep yang terutama berasal dari studi inovasi di sektor swasta. Mengakui ketegangan ini berarti mempertahankannya, menerima kekacauannya, dan menyadari bahwa kita tidak akan menyelesaikannya dengan mudah. Ini berarti menerima bahwa kita tidak dapat keluar dari kerumitan ketidakseimbangan kekuatan kita saat ini, dan bahwa kita harus, sebaliknya, berkomitmen untuk terus-menerus menerapkan lensa dekolonial pada pekerjaan kita.

Memahami cara-cara di mana ruang kemanusiaan dan pembangunan berakar dalam pada ketidakseimbangan kekuatan kolonial dan berupaya keras untuk mengubahnya secara mendasar adalah usaha yang kompleks. Inilah alasan utama keberadaan CLIP, dan mengapa kami mengambil kesempatan ini untuk merenung. Di CLIP, praktik inovasi kemanusiaan adalah cara berkolaborasi dengan ruang kemanusiaan sekaligus cara melawan struktur kekuasaan kolonialnya.

Pengalaman dalam kemitraan kami melukiskan gambaran yang bernuansa, dengan fokus utama pada pembelajaran dua putaran dan pemecahan masalah menciptakan ruang untuk keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi hal ini tidak seharusnya membawa kita ke kesimpulan bahwa inovasi kemanusiaan mungkin saja tanpa cela, atau bahwa kritik pascakolonial tidak diperlukan. Ini berarti melangkah lebih jauh dan memahami bahwa konsep-konsep seperti inovasi kemanusiaan terus ditafsirkan, dibongkar, disusun kembali, dan diterapkan dengan berbagai cara yang berbeda.

Dengan demikian, inovasi adalah kata kunci dalam arti sebenarnya. Seperti yang dinyatakan oleh Deborah Eade dalam bagian pendahuluan *Deconstructing*

Development Discourse, kata kunci tidak sama persis dengan “banyak makna dan nuansa, tergantung siapa yang menggunakannya dan dalam konteks apa” (Cornwall dan Eade, 2010). Jika kita menerima kekuatan wacana dominan tentang inovasi kemanusiaan, yang penting adalah untuk bersikap eksplisit tentang makna yang kita hubungkan dengan “inovasi kemanusiaan” versi kita sendiri sehingga menawarkan tantangan bagi pihak dominan – dan agar kita juga terbuka untuk tantangan.

Makalah ini mewakili bagian dari percakapan yang sedang berlangsung untuk memperjelas makna yang secara kolektif kita anggap berasal dari inovasi kemanusiaan, dan untuk menyatakan kembali nilai-nilai yang menjadi komitmen kita untuk dijunjung tinggi dalam pekerjaan kita. Di CLIP, kita melihat menjadi “dipimpin masyarakat” sebagai praktik berkelanjutan dari prinsip dan nilai yang ditentukan oleh masyarakat, bukannya menjadi tujuan akhir yang objektif. Melalui kemitraan ini, kami berusaha untuk mempromosikan kepemilikan dan kepemimpinan dari masyarakat, dan kami berusaha untuk memprioritaskan keahlian dan pengetahuan lokal. Dipimpin masyarakat berarti menantang pola pikir kita setiap hari untuk memastikan semua aspek pekerjaan kita dipimpin oleh nilai-nilai dan prioritas dari mereka yang ingin kita layani.

Kami berharap makalah ini mengilhami berbagai pertanyaan dan penelitian lebih lanjut. Misalnya, untuk membahas makna inovasi kemanusiaan dari bahasa masyarakat, dan memikirkan apa wujud atau manifestasi konkretnya, apa saja unsur untuk “membuka kunci” unsur inovasi tertentu bagi masyarakat dan sejauh mana pergeseran dinamika kekuasaan berlangsung di tingkat lokal.

Kami juga berharap makalah diskusi ini menunjukkan beberapa jalur yang penyandang dana dan pemimpin inovasinya dapat berpikir lebih reflektif dan sesuai dengan konteks lokal, mendukung upaya untuk mempertanyakan paradigma pengetahuan dominan yang ada dalam inovasi kemanusiaan, menerapkan kesetaraan sebagai nilai dasar dalam inovasi kemanusiaan, dan mewujudkan agenda lokalisasi dengan peningkatan timbal balik dengan pemegang pengetahuan lokal dan Pribumi. Yang penting, kami berharap bahwa aspek-aspek yang dibahas di sini – inovasi sebagai ruang politik, untuk memulihkan suara, untuk membuat keputusan secara lokal, untuk berfokus pada kekuatan dan aset – akan membantu memperjelas potensi kontribusi inovasi kemanusiaan untuk tugas dekolonisasi.

Bibliografi

- Ali, A & Murphy, M-RR (2020) 'Black Lives Matter is also a reckoning for foreign aid and international NGOs'. *Open Democracy*.
<https://www.opendemocracy.net/en/transformation/black-lives-matter-also-reckoning-foreign-aid-and-international-ngos/>
- ALNAP (2022) *The State of the Humanitarian System*. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI.
- Bhaumik S & Jagnoor J (2019) 'Diversity in the editorial boards of global health journals'. *BMJ Global Health*, 4:e001909. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001909>
- Bourne, S (2019) 'User-Centred Design and Humanitarian Adaptiveness'. ALNAP Case Study. London: ODI/ALNAP
<https://www.elrha.org/researchdatabase/user-centred-design-and-humanitarian-adaptiveness/>
- Bryman, A (2016) *Social Research Methods*. Edisi Kelima. Oxford; New York: Oxford University Press. <https://www.worldcat.org/title/social-research-methods-5th-edition/oclc/909714937>
- Chang, AM (2019) *Lean Impact: How to Innovate for Radically Greater Social Good*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Cornwall, A & Eade, D (ed) (2010) *Deconstructing Development Discourse: Buzzwords and Fuzzwords*. Oxford: Practical Action Pub; Oxfam
- Crenshaw, K. (1989), *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, Forum Legal University of Chicago: Vol. 1989; Ed. 1, Artikel 8.
- Duffield, M. (2019), 'Post-Humanitarianism: Governing Precarity through Adaptive Design', *Journal of Humanitarian Affairs*, 1(1), hlm. 15–27.
<https://doi.org/10.7227/JHA.003>.
- Ealdama, Y (2012) *Bayanihan: the indigenous Filipino strengths perspective*. Disajikan di Konferensi Internasional tentang Strengths Based Practice in Social Work and Human Services, Kathmandu, Nepal
- Elrha (akan datang) Global Prioritisation Exercise. Elrha: London.
- Escobar, A (1995) *Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press
- Evans, M & Madhok, S (2014) 'Epistemology & Marginality' dalam *SAGE Handbook of Feminist Theory*

Gelsdorf, K, Greenhalgh, L, Morinière, L, Vaughan-Lee, H, Billo, A & Souders, D (2017) *Global Prioritisation Exercise: Phase One Mapping*. Cardiff-London: Elrha

Gibson, C. (2018) 'Participatory Grantmaking: Has its time come?' New York: Ford Foundation. <https://www.fordfoundation.org/news-and-stories/stories/posts/has-the-time-come-for-participatory-grantmaking/>

Global Social Theory (tanpa tanggal): www.globalsocialtheory.org

Gudynas, E. (2011) 'Buen Vivir: Today's Tomorrow'. *Development* 54 (4): 441–47. <https://doi.org/10.1057/dev.2011.86>

Hamilton, Z., Casswell, J. and Alonso, A. (2020) 'Human-centred design in humanitarian settings: Methodologies for inclusivity'. Laporan Penelitian. London: GSMA. <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/human-centred-design-in-humanitarian-settings>

Heylighen, F (1993) 'Epistemology, Introduction'. *Principia Cybernetica*. September 1993. <http://pespmc1.vub.ac.be/EPISTEMI.html>

Jimenez, A & Roberts, T (2019) 'Decolonising Neo-Liberal Innovation: Using the Andean Philosophy of 'Buen Vivir' to Reimagine Innovation Hubs', dalam: Nielsen, P,

Kapoor, S & Rahmawati, H (2022) 'Early Learnings from Community-Led Humanitarian Innovation Partnerships, through an Anti-Racist Lens'. *Humanitarian Practice Network* (blog). 9 Mei 2022. <https://odihpn.org/publication/early-learnings-from-community-led-humanitarian-innovation-partnerships-through-an-anti-racist-lens/>

Kimaro, HC (ed) *Information and Communication Technologies for Development. Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D, IFIP Advances in Information and Communication Technology*. Springer International Publishing, Cham, 180–191. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19115-3_15

Konda, N. dkk. (2019) 'Human-centred design and humanitarian innovation: Designing solutions with people affected by disaster'. Makalah Penelitian. Start Network, CDAC Network. <https://startnetwork.org/resource/human-centred-design-and-humanitarian-innovation>

Koum Besson, ES (2022). 'How to identify epistemic injustice in global health research funding practices: a decolonial guide'. *BMJ Global Health* 2022;7:e008950

Kumpf, B, Strandberg, N & Barkell, R (2021) 'Part Two: Why Systems Innovation?' *International Development Innovation Alliance*. <https://www.idiainnovation.org/new-blog/2021/9/14/part-two-why-systems-innovation>

Liboiron, M (2021) 'Firsting in Research', *Discard Studies*. <https://discardstudies.com/2021/01/18/firsting-in-research/>

- Lugones, M (2008) 'The Coloniality of Gender'. *Worlds & Knowledges Otherwise*, 2 (Spring), 1–17
- McClure, D (2019) *Innovation 3.0: Building a Creative Ecosystem to Tackle Humanitarian Aid's Most Complex Challenges*. Elrha/GAHI, London
- McEwan, C (2019) *Postcolonialism, Decoloniality and Development*. Routledge
- Mignolo, W (2017) 'Interview - Key Concepts', <https://www.e-ir.info/2017/01/21/interview-walter-mignolopart-2-key-concepts/>
- Mohanty, C (2003) 'Under Western Eyes Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles'. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol 28, no 2
- Obrecht, A & Warner, A (2016) *More than just luck: Innovation in humanitarian action*. ALNAP
- Peace Direct (2021) *Time to Decolonise Aid* https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2021/05/PD-Decolonising-Aid_Second-Edition.pdf
- Ramalingam, B, Scriven, K & Foley, C (2009) *Innovations in international humanitarian action*. ALNAP, London. <https://www.alnap.org/help-library/innovations-in-international-humanitarian-action-alnaps-8th-review-of-humanitarian>
- Sandison, P. (2017) *User-Centred Design Through Rapid Community Engagement: A Landscape Review*. Cardiff-London: Elrha. <https://www.elrha.org/researchdatabase/user-centred-design-landscape-review>
- Sandvik, KB (2017). 'Now is the time to deliver: looking for humanitarian innovation's theory of change'. *Journal of International Humanitarian Action* 2, 8. <https://doi.org/10.1186/s41018-017-0023-2>
- Scott-Smith, T. (2016) 'Humanitarian neophilia: the "innovation turn" and its implications', *Third World Quarterly*, 37(12), hlm. 2229–2251. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1176856>.
- Spivak, GC (1988) *Can the Subaltern Speak?* Basingstoke: Macmillan
- Su, Y & Mangada, LL (2016) 'Bayanihan after Typhoon Haiyan: Are We Romanticising an Indigenous Coping Strategy?' *Humanitarian Practice Network*, 10 Agustus 2016. <https://odihpn.org/blog/bayanihan-after-typhoon-haiyan-are-we-romanticising-an-indigenous-coping-strategy/>.
- Tuck, E & Yang, K (2012) 'Decolonization is not a metaphor', *Decolonization: Indigeneity, Education & Society* vol 1, no 1, 1–40
- Vigoureux, D (2020) *What is Frontier Technology Livestreaming?* Frontier Technologies Hub. <https://medium.com/frontier-technologies-hub/what-is-frontier-technology-livestreaming-f29cef0e279a>

Wilson, K (2013). 'Agency as 'Smart Economics': Neoliberalism, Gender and Development'. In Madhok, S, Phillips, A & Wilson, K (ed) *Gender, Agency, and Coercion. Thinking Gender in Transnational Times*. Palgrave Macmillan, London.
https://doi.org/10.1057/9781137295613_6